

Kehidupan politik dalam organisasi politik dan pengaruhnya terhadap kesadaran kehidupan politik bangsa

M. Aswan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=80804&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun UUD 1945 telah diberlakukan, namun yang baru dapat terbentuk hanyalah Presiden / Wakil Presiden, yang dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari pasal IV Aturan Peralihan terlihat ketentuan yang menyatakan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan dari Komite Nasional. Sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem pemerintahan presidensial.

Pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945 berdiri Partai Nasional Indonesia yang menurut pimpinan negara merupakan satu-satunya partai politik di Indonesia, yang didukung oleh Soekarno dan Hatta.

Untuk menghilangkan kesan seolah-olah Presiden menjalankan kekuasaan secara "tidak demokratis", maka Wakil Presiden mengeluarkan apa yang disebut Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober 1945?

- Dukungan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai sesuai dengan tuntutan yang ada, seperti komputerisasi, pemakaian mesin-mesin pengolahan canggih, dan sebagainya;
- Kegiatan pemasaran yang berhasil memperpendek jarak, tanpa adanya ikut campur pihak "luar" yang terlalu jauh;
- Keterlibatan pemerintah dalam posisi yang " wajar ", dalam arti terbatas kepada proses pembinaan saja, seperti organisasi usaha, manajemen, pembukuan keuangan, dan sebagainya, tanpa terlalu jauh ikut campur ke dalam pengelolaan kegiatan usaha, Di sisi lain, dalam kegiatan usaha yang digeluti kedua koperasi obyek pembahasan, pemerintah telah berhasil menciptakan iklim kondusif, salah satunya dengan dikeluarkannya Inpres No. 2 Th. 1985 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional, yang antara lain menghimbau kepada perusahaan IFS untuk mengutamakan pemakaian hasil produksi susu dalam negeri terlebih dahulu, dan baru melakukan impor terhadap kekurangan yang ada.

Perkembangan usaha dan perwujudan kontribusi kedua koperasi di atas berimplikasi terhadap pembentukan kondisi wilayah/daerah Kecamatan setempat khususnya. Dengan kata lain, kedua koperasi telah menunjukkan peranannya dalam membentuk kondisi Ketahanan Wilayah/Daerah dalam lingkup Kecamatan (dan juga Kabupaten), terutama dalam aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan, atau dikenal dengan sebutan Panca Gatra. Peranan tersebut antara lain:

Dari segi ideologis: Kedua koperasi obyek pembahasan telah menemuk nilai kebersamaan para anggotanya yang tercermin melalui sistem kerja berkelompok, penganbnilan keputrsan secara bersama, dan sebagainya. Hal ini sejalan dan memperkuat nilai kebersamaan yang umumnya dianut oleh masyarakat Indonesia, ideologis Pancasila, serta cita-cita yang terkandung dalam pasal 33 UUD " 45.

Dari segi politik: Kedua koperasi telah mengenalkan dan menanamkan cara berorganisasi modern, yaitu peranan dan fungsi bangun usaha dalam mencapai peningkatan hidup anggota (dan keluarganya). Melalui pengelolaan usaha yang terorganisir secara baik, usaha yang dijalankan anggota dapat menjadi sumber penghasilan tetap yang lebih baik serta wahana peningkatan taraf hidup mereka. Di samping itu, melalui koperasi diintrodusir dan dikomunikasikan pula nilai-nilai demokratis sesuai dengan ciri yang disandang oleh bangun usaha koperasi;

Dari segi ekonomis: Kedua koperasi telah menjalankan peranan dalam meningkatkan pendapatan anggota, sehingga mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomis sehari-hari. Bukan itu saja, kedua koperasi telah menciptakan dan menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung;

Dari segi sosial-budaya: Dampak dari perolehan pendapatan tetap yang meningkat, memungkinkan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, dan sebagainya;

Dari segi pertahanan-keamanan: Karena kualitas penduduk yang meningkat serta pemahaman dan kesadaran akan nilai kebersamaan yang semakin kuat, mengakibatkan kesadaran terhadap keamanan lingkungan yang meningkat pula. Hal ini membawa kepada kondisi pertahanan-keamanan di wilayah sekitar yang semakin membaik atau tangguh. Salah satu wujud nyata adalah andil penyisihan sebagian hasil pendapatan anggota untuk kepentingan membangun pos-pos kamling I pos ronda, serta partisipasi aktif warga masyarakat terhadap gerakan sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Berdasarkan hasil studi kepada kedua koperasi obyek pembahasan, tampak bahwa pada dasarnya koperasi dapat menunjang pembentukan kondisi Ketahanan Nasional yang tangguh. Namun persyaratan mana yang harus dipenuhi adalah, kemampuan itu baru akan terwujud apabila koperasi tumbuh subur di bumi nusantara serta mencapai keberhasilannya sebagaimana yang diperlihatkan oleh kedua koperasi obyek pembahasan. Permasalahannya adalah, bagaimana memenuhi persyaratan tersebut?

Dari pengalaman kedua koperasi di was, dapat ditarik beberapa pelajaran yang perlu diperhatikan dalam upaya menumbuhkembangkan bangun usaha koperasi agar dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan, yaitu:

Kegiatan usaha yang dijanjikan bukan merupakan hal yang relatif "baru" dikenal, melainkan telah ada sejak lama, terintegrasi dalam drrr serta menjadi orientasi tingkah laku ekonomi warga masyarakat sehari-hari; ? Didukung oleh kondisi lingkungan sekitar, terutama dalam upaya pengembangan usaha;

Keseriusan dan ketekunan dari Pengurus dan Pelaksana. Dalam hal ini harus dibedakan antara kedua pihak tersebut, pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha harus dijalankan sepenuhnya oleh Pelaksana (bukan Pengurus) yang diperoleh koperasi melalui sistem perikatan;

Sedapat mungkin memperpendek jarak pemasaran antara koperasi dengan konsumen, tanpa melibatkan

pihak ketiga yang terlalu "jauh " dalam kegiatan pengelolaan pemasaran tersebut;

Keterlibatan pemerintah perlu berada pada batas dan posisi yang "wajar ", dalam arti hanya dalam konteks pembinaan tanpa terlalu dadam mencampuri pengelolaan kegiatan usaha. Termasuk dalam pembinaan ini adalah upaya pemerintah untuk tetap mewujudkan iklim kondusif, misalnya dengan memberikan perlindungan kepada kegiatan usaha koperasi untrrk mencegah adanya tindakan intervensi oleh pihak swasta. Namun yang perlu diperhatikan, perlindungan itu haruslah disertai dengan upaya untrrk membuat koperasi menjadi mandiri dan kompetitif nantinya, dan bukan menjadi manja serta ketergantungan terhadap peran pemerintah tersebut.